

KONSTRUKSI IDENTITAS AGAMA DAN BUDAYA ETNIS MINANGKABAU DI DAERAH PERBATASAN

Perubahan Identitas dalam Interaksi Antaretnis di Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Syafwan Rozi, disertasi Program Studi Religious Studies, dipertahankan di depan Sidang Senat Guru Besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, pada tanggal 7 Februari 2013.

ABSTRACT

This dissertation discusses the rise of religious and ethnic identity change in a frontier area in West Sumatera. Its analysis focuses on inter-ethnic interaction between Minangkabau people and other ethnic groups in a frontier area of Rao, Pasaman. This study finds that social relationship in a frontier area took place in the form of individual relationships between the Minangkabau people with the Mandailing people. In their social interaction, these communities were engaged in the process of cultural contact, conflict or competition, accommodation, assimilation, adaptation, acculturation, negotiation and contestation. This study confirms that the process of interaction affects the religious and cultural identity change. Finally, the construction of religious and Minangkabau ethnic culture in a frontier area formed a new identity which was established from the synthesis of a long process of social interaction. The construction of religious and cultural identity formed a religious and ethnic conflict prevention model.

Keywords: *Construction of Identity, Religious and Ethnic Identity, Frontier Area.*

ABSTRAK

Disertasi ini membahas tentang munculnya perubahan identitas agama dan etnis di daerah perbatasan di Sumatera Barat. Fokus penelitian adalah pada interaksi antar – etnis, antara orang-orang Minangkabau dan kelompok etnis lain di daerah perbatasan Rao, Pasaman. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan sosial di daerah perbatasan terjadi dalam bentuk hubungan individu antara masyarakat Minangkabau dengan orang-orang Mandailing. Komunitas ini terlibat dalam proses kontak budaya, konflik

atau persaingan, akomodasi, asimilasi, adaptasi, akulturasi, negosiasi dan kontestasi dalam interaksi sosial mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa proses interaksi memengaruhi perubahan identitas agama dan budaya. Pembangunan budaya etnis Minangkabau dan budaya agama di daerah perbatasan membentuk identitas baru yang merupakan sintesis dari proses panjang interaksi sosial. Pembangunan identitas agama dan budaya membentuk model pencegahan konflik agama dan etnis .

Kata Kunci: *Konstruksi Identitas, Identitas Agama dan Etnis, Daerah Perbatasan.*

PENDAHULUAN

Peralihan dari era Orde Baru ke era Reformasi telah mengubah pandangan masyarakat Indonesia tentang identitas etnik dan agama. Kebangkitan identitas di era Reformasi dimaknai dengan munculnya identitas kedaerahan dan kesadaran politik baru untuk merestrukturisasi nilai-nilai kearifan lokal atas dasar primordial etnis dan agama. Dalam ranah sosial budaya, kebangkitan identitas tercermin dari upaya memasukan nilai-nilai keetnisan ke dalam peraturan daerah, pemekaran wilayah berbasis etnis dan perjuangan untuk mendapatkan otonomi khusus. Sementara dalam konteks keagamaan, kebangkitan identitas terefleksi dalam aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk bermunculannya “perda syariah”, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu (Nordholt dan van Klinken 2007).

Fenomena di atas juga ditemukan secara spesifik di Sumatera Barat sebagai salah satu dari sedikit daerah administratif setingkat provinsi di Indonesia yang teritorialnya identik dengan daerah budaya Minangkabau (Asnan 2006). Kebangkitan identitas agama dan budaya etnik Minangkabau ditandai dengan munculnya Perda *Nagari*, sebuah peraturan provinsi untuk mengembalikan sistem pemerintahan desa ke sistem pemerintahan otonom *Nagari* (Franz dan Keebet von Benda Beckmann 2007). Penerapan Perda *Nagari* yang menegaskan identitas agama dan etnik “*Adat Basandi Syara’: Syara’ Basandi Kitabullah*” merupakan politik identitas etnis Minangkabau di seluruh daerah Sumatera Barat termasuk daerah yang dihuni oleh etnik lain seperti di perkotaan, daerah pinggiran dan perbatasan tanpa terkecuali (Biezeveld 2010).

Tapi sayangnya, euforia kebangkitan identitas Minangkabau tidak berjalan lama seiring dengan perkembangan dan evaluasi yang tidak menggembirakan dalam penerapan Perda *Kembali ke Nagari* dan *Kembali ke Surau* di Sumatera

Barat termasuk di daerah Rao perbatasan (Rozi 2009). Tapi di sisi lain, ketidakefektifan Perda *Nagari* dan Perda Syariah di daerah pinggiran atau perbatasan ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan dan kebangkitan identitas agama dan etnik Minangkabau di daerah multietnik yang tidak hanya dihuni oleh etnik Minangkabau saja, tapi dihuni oleh etnik lain seperti Mandailing dan Batak Toba. Temuan di lapangan menjelaskan bahwa terdapat beberapa gugatan identitas masyarakat perbatasan terhadap identitas agama dan budaya mayoritas Minangkabau yang selama ini “dilekatkan” kepada mereka. Padahal mereka telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan demografi kultural dan interaksi sosial dengan beberapa etnik lain.

Pada prinsipnya, perubahan identitas adalah suatu keniscayaan yang didorong oleh dinamika yang menjiwai kebudayaan etnik Minangkabau sendiri. Sejak dulu identitas Minangkabau sangat kuat dan ambivalen dalam beraneka ragam lapisan yang penuh dengan kontradiksi-kontradiksi. Secara historis, adat atau budaya merupakan lapisan tertua kemudian berdialektika dengan unsur-unsur luar seperti agama Islam, kebudayaan Barat yang dibawa oleh penjajahan Belanda, dan nilai-nilai demokratisasi dan nasionalisme dalam kebudayaan modern (Franz dan von Benda Beckmann 2007). Perubahan identitas agama dan budaya Minangkabau dapat dibuktikan dalam identitas-identitas Minangkabau seperti sistem kekerabatan, sistem perkawinan, sistem kepemilikan dan kewarisan serta sistem organisasi sosial yang akan terus mengalami pembaharuan, perkembangan dan dialektika.

Kebangkitan identitas tidak hanya merupakan praktik perjuangan berbasiskan identitas kelompok atas dasar etnik, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya (Sparringa 2005). Dalam hal ini, kebangkitan identitas dimaknai dalam bentuk kesadaran dan mobilisasi atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*) oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif (Hall 1996). Di samping itu, kebangkitan identitas juga merupakan dampak perubahan identitas dalam proses interaksi antaretnik. Perubahan identitas merupakan wujud kedinamisan budaya, karena pada prinsipnya kebudayaan bukanlah suatu yang statis, melainkan mengalami perubahan secara evolusioner (Nursyam 2011). Identitas bukanlah sesuatu yang permanen, tetap dan tidak bisa berubah. Identitas menjadi hal yang

terbuka untuk ditafsirkan kembali, diubah dan dimanfaatkan dalam proses sosial (Ramstedt 2011).

Dengan demikian, perubahan identitas ini disebabkan oleh perubahan batas-batas identitas secara arbiter oleh dinamika sosial. Identitas-identitas itu bisa dirubah dan dibangun dalam dinamika dan interaksi sosial masyarakat. Adapun pertanyaan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana proses dan pola interaksi etnik Minangkabau dengan etnik-etnik lain di daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara? *Kedua*, bagaimana proses perubahan identitas agama dan budaya etnik Minangkabau yang terjadi dalam proses interaksi antar etnik di daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara? *Ketiga*, bagaimana konstruksi identitas agama dan budaya etnik dalam proses interaksi antar etnik di daerah perbatasan?

METODOLOGI

Dalam konsepsi kultural, daerah Minangkabau dibagi dalam dua lingkungan wilayah yaitu: (1) Daerah *darek* atau Minangkabau inti, yang merupakan organisasi masyarakat berdasarkan prinsip geneologi adat istiadat dan keturunan. *Darek* terdiri dari tiga bagian yang disebut *luhak* yaitu *luhak* Agam, *luhak* Tanah Datar dan *luhak* Lima Puluh Koto; (2) Daerah *rantau*, yaitu daerah perluasan bentuk koloni dari setiap *luhak* tersebut di atas yaitu; *pertama*, *rantau luhak* Agam yang meliputi dari pesisir barat Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman. *Kedua*, *rantau luhak* Lima Puluh Koto yang meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan, Rokan Kanan, Rokan Kiri; *Ketiga*, *rantau luhak* Tanah Datar meliputi Kubuang Tigo Baleh, Pesisir Barat, Pesisir Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh (Batuah 1959). Hampir semua *tambo* atau historiografi tradisional Minangkabau menyebutkan bahwa *rantau* Pasaman terdiri dari daerah Lubuk Sikaping, Rao, Talu, Ophir dan Air Bangis (Asnan 2003).

Oleh karena *rantau* Pasaman itu sendiri cukup luas, maka disertasi ini memfokuskan pada kawasan yang dikenal dengan Rao, salah satu daerah yang menjadi bagian dari *rantau* Pasaman. Secara administratif, saat ini Rao merupakan daerah yang berada dalam tujuh kecamatan di Kabupaten Pasaman yaitu; Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Rao Selatan dan

Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Mapat Tunggul Utara dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat (Tim Penyusun 2009).

Adapun fokus dalam disertasi ini adalah perilaku sosial masyarakat perbatasan terutama komunitas etnik Minangkabau. Khususnya, proses interaksi mereka dengan etnik lain dalam mengekspresikan identitas agama dan budaya mereka seperti pelaku *slametan*, *yasinan* dan *salawatan*, ritual perkawinan, kewarisan dan tradisi budaya lain. Sedangkan informan yang dipilih adalah masyarakat Rao pelaku dimensi-dimensi keagamaan dan unsur-unsur budaya. Tokoh dan elit keagamaan dan budaya juga dijadikan informan dalam penelitian karena pengetahuan dan pemahaman mereka tentang realitas. Mereka adalah pemimpin informal lembaga adat dan agama seperti *ninik mamak*, alim ulama, *bundo kanduang* sebagai kelompok *proximate decision maker*, elit dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui banyak hal tentang persoalan masyarakat yang berkembang di nagari-nagari tersebut

Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga cara yaitu: studi kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi (Moleong 2006). Studi kepustakaan yakni mengumpulkan, meneliti dan menganalisis data dokumentasi, buku-buku dan jurnal-jurnal tentang sejarah, dinamika agama dan budaya masyarakat Minangkabau terutama orang Rao Sumatera Barat. Tulisan-tulisan termasuk literatur kolonial dan yang ditulis oleh penulis asing dan Indonesia sendiri sangat berguna untuk membangun arah dan pendekatan penelitian. Selanjutnya wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi, pengalaman dan perasaan masyarakat Rao terhadap perilaku dan praktik keagamaan dan budaya mereka. Wawancara secara mendalam dilakukan terhadap orang yang memahami fenomena sosial. Adapun teknik observasi dilakukan dengan mengamati fenomena dan gejala sosial masyarakat dalam praktik keagamaan dan perilaku budaya mereka. Peneliti juga ikut serta dalam kegiatan keagamaan dan tradisi budaya etnik seperti acara *tablig akbar*, *tahlilan*, *selamatan*, *ziarah* serta hadir dalam acara perkawinan dan kematian di perbatasan Rao.

Langkah awal penelitian yang dilakukan adalah menemukan dan menyusun struktur identitas agama dan budaya orang Minangkabau berdasarkan studi kepustakaan. Berdasar struktur yang ditemukan, data-data lapangan kemudian dianalisis dengan menjabarkan dan memahami bagaimana model ini mengambil bentuk-bentuk konkret sesuai dengan ruang dan waktu dan keterlibatan aktor serta kelompok sosial di dalamnya. Cara aktor

menginterpretasi dan memaknai identitas agama dan budaya yang berkembang dan hadir di hadapannya diinterpretasi lewat data-data yang terkumpul. Langkah analisis terakhir adalah menghubungkan perilaku keagamaan dan kebudayaan aktor dan kelompok sosial dengan segala dinamika interaksi mereka dengan berbagai etnik. Dalam konteks ini, relasi sosial antara aktor dan kelompok sosial, aturan (adat), material serta sumber daya yang dimiliki dan dilibatkan dalam praktik keagamaan dan kebudayaan, dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh

KERANGKA TEORETIK

Dalam interaksi dan dinamika sosial masyarakat Minangkabau, perubahan-perubahan identitas itu selalu terjadi terutama dalam proses interaksi sosial mereka di daerah multietnik. Namun selama ini dalam ranah ilmu sosial, studi identitas ditemukan dalam pemahaman bahwa identitas itu tidak bisa dirubah, pribadi, dan tetap. Hanya saja dalam konteks kekinian, identitas sudah dipahami sebagai aspek publik, bisa diubah dan dinegosiasikan (Eriksen 1993). Menurut Week seperti dikutip Hasanuddin (2009), identitas merupakan konstruksi yang menggambarkan perihal esensi diri seseorang atau suatu kelompok yang disadari oleh subjeknya dan diakui oleh orang atau kelompok lain. Identitas itu dibentuk atau dibangun dari buah interaksi yang dinamis antara konteks dan konstruksi. Maka sifatnya situasional dan bisa berubah, disusun dalam hubungannya dengan sejumlah kelompok. Identitas juga dapat ditandai dengan faktor material budaya seperti makanan, pakaian dan perumahan, di samping faktor nonmaterial seperti bahasa, adat istiadat dan kepercayaan.

Selanjutnya, menurut Michael E. Brown (1997) dan D. Bruce MacKay (2000) ada tiga perspektif dalam memahami identitas etnik yaitu; primordialisme, instrumentalisme dan konstruktivisme. *Pertama*, primordialisme, perspektif ini melihat identitas etnis yang bersifat stabil, *fixed, ascribed* atau identitas manusia yang diberikan sejak manusia itu lahir. Identitas ini menempel dan tidak bisa ditolak oleh manusia itu sendiri, tidak dapat berubah dalam jangka waktu yang relatif lama. *Kedua*, instrumentalisme, sebuah perspektif yang melihat identitas sebagai sebuah bentuk manipulasi dari beberapa kelompok dominan. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti budaya, ras, dan agama yang berlaku dalam masyarakat dijadikan sarana mobilisasi oleh elit

politik untuk persaingan kepentingan politik dan ekonomi (Bradley H. 1997). Sedangkan, *ketiga*, konstruktivisme, yakni sebuah upaya respon dari tekanan situasi kelompok dominan, respon terhadap perlakuan pilih kasih, dan juga upaya defensif dari suatu kelompok. Berdasarkan pandangan ini, maka proses konstruksi sosial selalu dikaitkan dengan keterlibatan anggota komunitas kelompok dan elite.

Terkait dengan penerapan perspektif konstruktif dalam perubahan identitas etnik Minangkabau di daerah perbatasan, penulis merujuk pada pemikiran Castell yang menguraikan konstruksi identitas sebagai formasi identitas, melalui tiga sudut yang berbeda, yaitu: *legitimizing identity*, *resistance identity*, dan *project identity* (Castells 2004). *Legitimizing identity* menawarkan pembahasan bahwa identitas yang dipaksakan oleh suatu lembaga dominan, misalnya, negara. Dengan kata lain, bahwa kajian identitas dari perspektif kelompok atau lembaga dominan yang bertujuan memperoleh rasionalisasi dan justifikasi atas dominasi dan otoritasnya terhadap yang lain. *Resistance identity*, adalah salah satu identitas tandingan yang muncul menentang penyeragaman identitas oleh lembaga dominan. *Resistance identity*, membuka cara melihat identitas dari sudut pandang kelompok yang tertindas, dimarginalisasi, dan atau didevaluasi oleh kelompok dominan. Dapat diartikan bahwa perspektif ini dapat mudah ditemukan di kalangan kelompok minoritas serta mereka yang termarginalkan, biasanya diberikan kepada kelompok suku bangsa, ras, etnik, atau bahkan agama tertentu. *Project identity*, sebagai identitas tandingan, dibangun dengan antusias oleh kelompok-kelompok yang menjunjung otonomi dan ingin lepas dari jeratan masa lampau.

Di samping itu, konstruksi identitas dapat dipahami sebagai dinamika dan perubahan budaya. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebagai produk dari proses budaya sebelumnya dan sebagai sesuatu yang terbuka bagi segala reinterpretasi dan gagasan-gagasan baru serta ausnya komponen lama. Kebudayaan bukanlah suatu yang statis, melainkan bisa mengalami perubahan walaupun lambat tapi pasti atau yang dikonseptualisasikan secara evolusioner (Nursyam 2009). Dengan konseptualisasi kebudayaan inilah, Kahn berpendapat identitas budaya tak hanya dikonstruksi tetapi juga menemukan konteksnya (Kahn 1995).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, konstruksi identitas etnis dipahami sebagai perubahan identitas yang mengakibatkan perubahan sosial dan budaya komunitas tertentu. Untuk melihat konstruksi identitas yang mengakibatkan

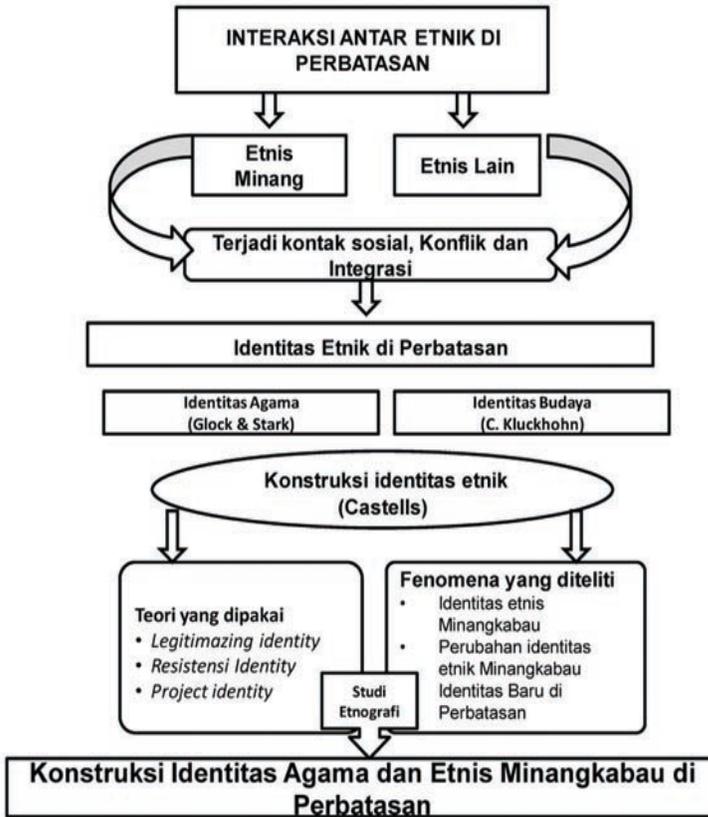
perubahan budaya tersebut, dapat ditemukan dalam interaksi sosial antara komunitas. Menurut E. Part sebagaimana dikutip Judistira K. Garna (1993), interaksi antara kelompok etnis merupakan studi menarik dalam perubahan budaya terutama terkait dengan kontak budaya dan interaksi antarkelompok.

Dengan demikian, perspektif yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori interaksionisme simbolik. Teori ini berprinsip bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Realitas sosial bukan alat yang statis seperti struktur dan pranata sosial yang dipaksakan oleh fakta sosial dengan teori struktural fungsional dan teori konflik. Artinya menurut paradigma definisi sosial, tindakan manusia *tidak sepenuhnya* ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan dan nilai-nilai. Dalam teori ini manusia sebagai aktor mempunyai banyak kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol dari fakta sosial itu. Berbeda dengan paradigma fakta sosial, bahwa manusia dikendalikan oleh norma, nilai serta sekian alat pengendalian sosial lainnya (George 2004). Hal senada juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1969), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara manusia dengan kelompok masyarakat.

Berdasarkan kerangka teoretik di atas, dinamika keagamaan dan perilaku budaya masyarakat dalam interaksi antaretnik di daerah multietnik seperti Rao ini telah memunculkan dinamika sosial dan interaksi seperti kontak sosial, konflik dan integrasi. Bahkan dalam interaksi selama puluhan tahun telah memunculkan dinamika agama dan budaya khas perbatasan. Dinamika agama dan budaya khas tersebut muncul dari perubahan budaya dari proses panjang interaksi antaretnik dan antar penganut paham keagamaan. Tidak hanya itu, perubahan paham keagamaan dan dinamika budaya tersebut melahirkan konstruksi baru identitas agama dan budaya etnik Minangkabau di perbatasan. Kerangka pemikiran ini dikemukakan dalam bagan berikut:

Bagan: 1
Kerangka Pemikiran dalam Memahami Konstruksi Identitas Agama dan Budaya

Etnik Minangkabau di Daerah Perbatasan



POLA INTERAKSI ANTARETNIK DI RAO

Interaksi antaretnik di daerah Rao perbatasan telah berlangsung sejak puluhan tahun silam seiring dengan migrasi etnik dari Tapanuli ke daerah ini. Menurut Tambo Datoek Batoeah Sango (1966), migrasi etnik Mandailing telah dimulai pada akhir abad ke 16 M, sedangkan Castles (1974) berpendapat sekitar abad ke 17 M. Di samping itu, Undri (2008) meyakini bahwa migrasi yang intens dimulai masa Perang Padri abad ke 18, para migran ini diberi tanah pemimpin Padri. Selanjutnya menurut Undri (2008) terjadi gelombang migrasi etnis

Mandailing dari Tapanuli Selatan ke daerah Rao Mapat Tunggul pada tahun 1915, setelah pemerintah kolonial mengeluarkan keputusan Gubernur Jenderal No.31 mengenai undang-undang agraria atau *domein verklaring*. Bahkan, pada tahun 1950-an pun migrasi Mandailing, Batak dan Jawa di daerah Pasaman mulai menunjukkan intensitasnya. Gagasan untuk memindahkan orang Batak dan Mandailing dari daerah utara ke daerah Pasaman, kemudian dirintis oleh Bupati Pasaman Busyarah Lubis tahun 1947-1949 yang merupakan keturunan etnik Mandailing. Migrasi etnik Batak Toba yang menganut agama Kristen Katolik tidak dapat dibendung, sehingga di beberapa jorong/nagari terdapat konsentrasi umat kristiani. Kedatangan etnik Mandailing Islam dan Batak yang Kristen ke wilayah Pasaman disusul oleh pendatang dari etnik Jawa yang sebagiannya Kristen sebagai buruh perkebunan. Migrasi etnik Jawa ini berlanjut ketika program transmigrasi menjadi strategi pemerintah Orde Baru untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa (Undri 2008).

Pengkategorian etnik-etnik di daerah Rao terdiri dari etnik Minangkabau sebagai penduduk asli (*urang asa*) yaitu orang yang lebih dahulu mendiami suatu daerah. Selanjutnya etnik Mandailing dan Batak Toba sebagai penduduk pendatang (*urang datang*), mereka yang datang kemudian tinggal dan menetap di daerah itu. Keberadaan kelompok etnik dalam suatu sistem sosial dapat diukur dari ada atau tidaknya individu satuan etnik berperan serta dalam aktivitas lingkungan sosial. Selain diukur dari faktor keberadaannya di dalam sistem sosial, lebih dari itu yang penting adalah sejauh mana keterlibatan di dalam berbagai bentuk hubungan sosial yang terjadi di dalamnya.

Pada awalnya, etnik-etnik tersebut cenderung tinggal berkelompok berdasarkan etnik mereka walaupun sebagian kecil di antara mereka menyebar dan tinggal tidak berdasarkan pada pengelompokan etnik. Pengelompokan pemukiman penduduk berdasarkan etnik tertentu di daerah multietnik ini pernah dibuat oleh Mc William sebagaimana dikutip oleh Undri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Nama Nagari dan Etnik yang Menempati Daerah Rao pada Tahun 1983

No	Nama Nagari	Etnik	Adat	Pertamakali menghuni	Suku asli
1	Rabi Jangor	Mandailing	Mandailing	± 200 tahun yang lalu	Lubis, Nasution
2	Rao Mapat Tunggul	Minangkabau	Minangkabau	Tidak ada data	Melayu
3	Sontang	Mandailing	Mandailing	Tidak ada data	Lubis, Nasution

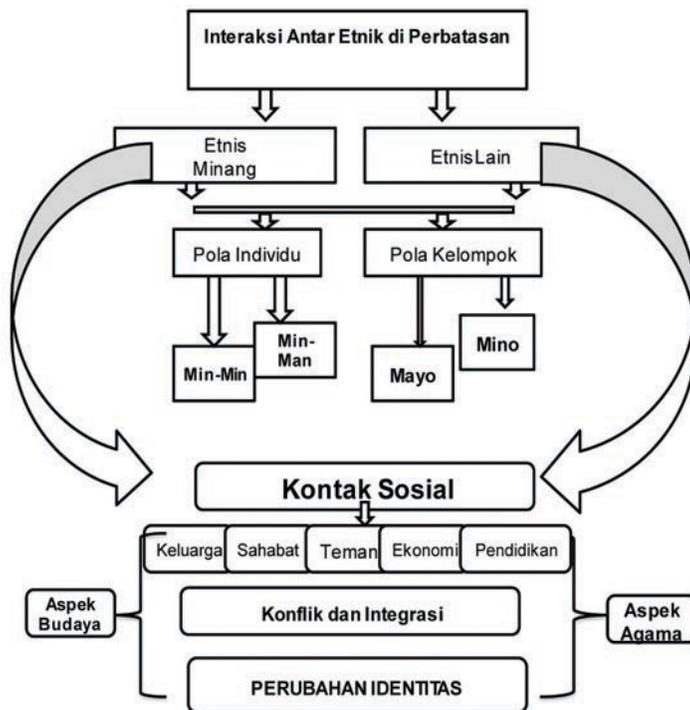
Sumber: Undri dari McWilliam 1983: 15

Hanya saja, migrasi dan interaksi etnik sebelum 1950-an tersebut tidak membentuk corak baru dalam dinamika sosial di Rao. Pada fase itu interaksi terjadi secara intens dan jarang terjadi konflik. Identitas Minang sebagai identitas mayoritas pada waktu itu tidak terjadi perubahan secara signifikan. Fenomena ini disebabkan karena etnik yang datang menghargai budaya setempat. Mereka masih menghormati adat dan tradisi setempat dan menjunjung adagium “di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung”. Artinya para pendatang yang menetap di suatu daerah seharusnya menghormati budaya setempat. Etnik asli menerima dengan tangan terbuka setiap etnik yang datang ke daerah mereka.

Namun, saat ini seiring dengan proses migrasi dan semakin terbukanya daerah perbatasan telah terjadi beberapa perubahan konsentrasi tempat tinggal etnik. Kantong-kantong etnik yang dihuni oleh mayoritas Minangkabau secara perlahan tapi pasti telah berubah menjadi daerah yang dihuni oleh beberapa etnik yang berbeda. Walaupun ada yang masih bertahan yang hanya dihuni oleh etnik asli, tapi umumnya daerah ini berada di pedalaman. Bahkan yang menarik, ada kantong-kantong etnik di daerah baru yang didominasi oleh etnik pendatang, mereka tinggal secara eksklusif dan menjalankan tradisi mereka. Fenomena ini sangat kentara dalam arus migrasi dan interaksi pasca 1950-an di mana terjadi perubahan signifikan dalam realitas sosial masyarakat Rao. Banyak sistem budaya Minangkabau yang berubah karena interaksi yang semakin intens pada periode ini. Kuatnya arus migrasi beberapa etnik mengakibatkan unsur-unsur budaya dan sosial masyarakat mulai berubah. Pada fase ini banyak ditemukan persoalan sosial bahkan konflik etnik mewarnai dinamika sosial di daerah ini. Bahkan sejak itu terjadi perubahan identitas etnik Minangkabau dalam proses interaksi antaretnik di daerah multi etnik ini.

Interaksi antaretnik di Rao sangat unik dan spesifik karena mengarah pada upaya mempertahankan dan kebutuhan mendefinisikan identitas diri dan kelompok. Hubungan sosial di antara kelompok etnik berlangsung dinamis. Realisasinya dapat dilihat dalam bentuk interaksi sosial antara individu-individu dalam suatu masyarakat seperti kontak sosial, konflik, akomodasi, adaptasi, asimilasi, akulturasi, negosiasi dan kontestasi. Interaksi yang terjadi pada prinsipnya merupakan proses pengorganisasian berbagai identitas etnis dengan perilaku dan budaya etnik bersangkutan. Dengan demikian terdapat struktur interaksi yang kemudian melahirkan beberapa pola interaksi antaretnik di daerah perbatasan ini. Struktur interaksi yang dimaksudkan merupakan suatu bentuk kombinasi spesifik antarkelompok dalam situasi sosial. Penelitian ini kemudian menghasilkan pola interaksi antaretnik di perbatasan berdasarkan fenomena di lapangan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 2. Pola Interaksi Etnik Minangkabau di Perbatasan



Pola tersebut merupakan hasil telaahan dari teori interaksi antaretnik dan penemuan di lapangan yang kemudian melahirkan satu pola sederhana.

Adapun temuan penulis tentang stuktur interaksi antaretnik mengacu pada pendapat Parsudi Suparlan (1989) tentang struktur hubungan sosial antara etnik dalam dikelompokkan menjadi tiga kategori: 1. Hubungan antar suku bangsa asal; 2. Hubungan etnik asli dan etnik pendatang; dan 3. Hubungan antara sesama etnik pendatang. Namun, stuktur interaksi sosial lebih spesifik di daerah perbatasan Rao mengarah dua varian pola hubungan yaitu: 1) pola hubungan orang perorang berupa hubungan antarsuku bangsa asal atau Minang dengan Minang, hubungan etnik asli dan etnik pendatang atau Minang dengan Mandailing atau Batak Toba. Serta, hubungan antara sesama etnik pendatang atau Mandailing dengan dengan Batak Toba; 2) Pola hubungan kelompok berupa interaksi di antara kelompok mayoritas etnik Minang dengan etnik lain yang minoritas dalam konteks penelitian ini diistilahkan dengan komunitas mayoritas. Interaksi di antara kelompok mayotitas etnik lain dengan etnik Minang yang minoritas yang diistilahkan dengan komunitas minoritas. Pola-pola hubungan tersebut baik antar individu maupun antarkelompok mempunyai dinamika dan spesifikasi berbeda yang kemudian mengarah pada perubahan dan pembentukan identitas.

Selanjutnya, jenis dan sifat hubungan sosial mengacu pada pendapat Aristotle dalam Ibn Hajar (1998) yang menyatakan bahwa umumnya terdapat tiga bentuk hubungan yaitu: 1) sebagai keluarga atau kerabat; 2) sebagai sahabat; dan 3) sebagai teman atau kenalan. Adapun di daerah perbatasan terdapat beberapa jenis hubungan sosial di samping kekeluargaan, sahabat, dan teman juga ditemukan dimensi pendidikan dan ekonomi. Namun demikian, hubungan yang paling intens dan dinamis adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan dan hubungan pendidikan berupa hubungan guru dan murid, syeikh dan murid. Hubungan kekeluargaan berdampak pada perubahan dimensi budaya lain seperti kekerabatan, kewarisan dan kepemilikan harta komunal. Hubungan pendidikan kemudian berdampak pada perubahan dimensi-dimensi paham keagamaan seseorang.

PERUBAHAN IDENTITAS AGAMA DAN BUDAYA ETNIK MINANGKABAU DI RAO

Perubahan Identitas Agama di Rao: Sebuah Sinkretisme Agama”Baru”

Proses interaksi antaretnik di daerah Rao tidak hanya memunculkan konflik dan integrasi budaya, tetapi memunculkan perubahan-perubahan dalam

aspek keagamaan. Perubahan identitas keagamaan ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa agama Islam yang datang ke Minangkabau khususnya Rao berhadapan dengan sosial budaya masyarakat perbatasan yang khas. Di sini, agama berasimilasi dengan budaya lokal perbatasan yang dihuni oleh beberapa etnik. Fenomena menarik inilah yang menjadikan Islam perbatasan yang khas berbeda dengan sejarah sosial Islam di Minangkabau secara umum.

Seiring dengan kondisi sosial Rao sebagai daerah *rantau* atau penyebaran yang dihuni oleh beberapa etnik, di daerah ini juga berkembang beberapa organisasi dan paham keagamaan di antaranya seperti Muhammadiyah, Tarekat Naqsyabandiah, Perti dan NU. Dinamika sosial, pendidikan dan afiliasi politik keagamaan beberapa organisasi keagamaan ini telah meramaikan dinamika dan perkembangan sosial yang khas di daerah perbatasan. Dari segi etnisitas, pengikut Muhammadiyah tidak mesti dari etnik Minangkabau, beberapa etnik Mandailing telah menjadi anggota Muhammadiyah. Sedangkan paham keagamaan NU lebih cenderung didominasi oleh etnik Mandailing. Hal yang berbeda ditemukan pada organisasi keagamaan Perti dan Naqsyabandiah yang dianut oleh etnik Mandailing dan juga etnik Minangkabau.

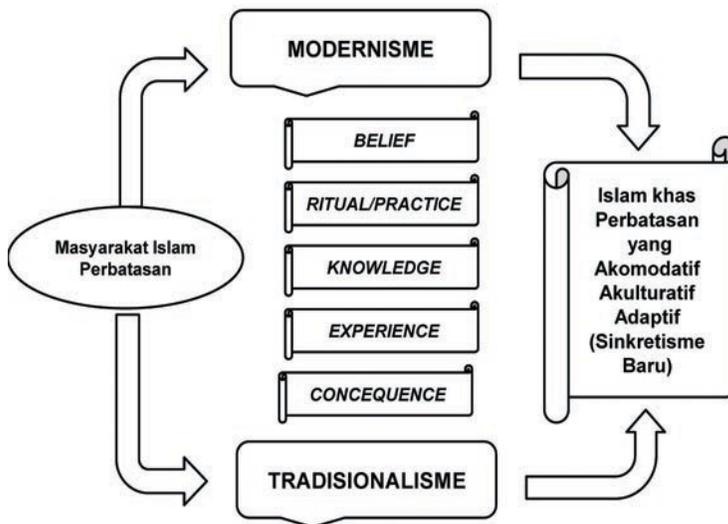
Beberapa organisasi keagamaan di daerah Rao dapat ditipologikan kepada modernis dan tradisional sebagai varian untuk melihat tipologi masyarakat Islam perbatasan. Hal ini karena dua istilah tersebut lebih moderat dan mewakili kondisi sosial keagamaan masyarakat. Sementara itu, dalam ranah kajian sosial antropologi menurut Dadang Kahmad (2002) istilah modernisme dan tradisionalisme merupakan tipe ideal dari dua tatanan masyarakat yang berbeda¹. Muhammadiyah cenderung berpaham modernis karena secara umum gerakan keagamaan ini melancarkan ide-ide pembaharuan bersifat puritan, skripturalis, dan menentang kepercayaan budaya sinkretis yang bercampur baur dengan unsur-unsur tradisi. Sedangkan NU, Perti dan Tarekat Nasyabandiah cenderung berpaham tradisional karena prinsip keyakinan mereka secara umum bersifat mistis, hierarkis dan permisif terhadap unsur budaya lokal.

¹ Pada umumnya pengertian modern mencakup ciri-ciri masyarakat tertentu yang ditemui sekarang ini. Sedangkan pengertian *ancient* atau *traditional* mencakup “pengertian sisa” (*residual sense*) dari ciri-ciri masyarakat modern. Istilah modern ini kemudian dipahami sebagai masyarakat masa kini yang berorientasi ke depan. Mereka berusaha mengubah dan memperbaharui aspek lama dalam kehidupan mereka sekarang. Sedangkan tradisional merupakan masyarakat yang hidup pada masa kini yang berorientasi masa lalu. Mereka berusaha menjaga keaslian dan warisan masa lalu sebagai acuan dan pedoman hidup untuk masa kini dan akan datang. Orientasi pada masa depan dan masa lalu ini merupakan tipe-tipe populer yang merepresentasikan masyarakat Islam.

Beberapa paham keagamaan ini dalam beberapa kasus memunculkan perbedaan pola tindakan dan interpretasi sehingga terjadi konflik dan integrasi dalam interaksi sosial mereka.

Selanjutnya disertasi ini merumuskan bagan perubahan identitas agama di perbatasan. Bagan ini merupakan hasil telaahan berdasarkan teori lima dimensi keagamaan dari Glock dan Stark (1968) yaitu dimensi *belief*kepercayaan, dimensi ritual, dimensi pengetahuan, dimensi pengalaman dan dimensi konsekuensi beragama. Masing-masing dimensi ditelaah melalui varian-varian yang ada dalam masyarakat Rao yaitu varian tradisional dan modernis.

Bagan 3. Perubahan Identitas Agama Etnik Minangkabau di Rao



Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan bahwa kalangan modernis seperti pengikut Muhammadiyah mulai akomodatif memasukkan budaya lokal dalam paham dan perilaku keagamaan mereka. Perayaan hari besar Islam seperti *Maulidan* dan *Isra' Mikraj* bersama dengan penganut paham keagamaan lain merupakan bentuk akomodasi kelompok modernis. Bahkan mereka cenderung akulturatif dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal dalam praktik dan ritual keagamaan seperti ikut serta dalam kegiatan *wiridan*, *salwatan* dan *selamatan*, walaupun mereka menerapkan standar baku selagi tidak menyimpang dari ajaran dasar agama Islam.

Karakteristik Muhammadiyah di daerah perbatasan ini tidak bisa dikategorikan gerakan puritan yang berusaha secara radikal membersihkan paham keagamaan dari budaya sinkretis yang mengarah pada penyimpangan agama sebagaimana penelitian Greertz (1966) dan Sutiyono (2011). Temuan penelitian ini cenderung mendekati penelitian Peacock (1978), Nakamura (1983), Beck (1995) dan Beaty (2001) yang membahas masyarakat Muhammadiyah lebih toleran dan moderat. Menurut mereka sikap toleran dan moderat yang dianut kelompok modernis ini bertujuan untuk menyesuaikan dan memperlihatkan sikap toleran terhadap kelompok tradisional yang sinkretis. Sedangkan sikap toleran yang dimunculkan kalangan modernis di daerah perbatasan ini adalah adanya kesadaran bersama untuk saling menghargai dan menjaga stabilitas masing-masing. Sehingga dengan sikap toleran dan moderatnya ini Muhammadiyah berkembang di daerah perbatasan yang dihuni oleh mayoritas kalangan tradisional.

Sementara itu, kalangan tradisional seperti NU, Perti dan Tarekat Naqsyabandiah “mulai agak” selektif dalam memasukkan unsur budaya lokal dalam pemahaman dan perilaku keagamaan mereka. Mereka melakukan upaya puritanisme seiring dengan semakin berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat ke arah keaslian ajaran Islam itu sendiri. Di lapangan ditemukan praktik-praktik keagamaan kelompok tradisional seperti *tahlilan*, *selamatan* dan *shalawatan* sudah mulai meninggalkan praktik bakar kemenyan dan sesajen. Mereka sudah menyadari praktik-praktik tersebut sebenarnya menyimpang dari ajaran agama walaupun tradisi-tradisi tersebut harus tetap dilestarikan sebagai sarana dakwah dan silaturahmi masyarakat tradisional. Ada semacam sikap adaptif yang mereka terapkan seiring dengan maraknya gerakan pemurnian di Minangkabau. Bahkan di daerah Rao terdapat kelompok wirid *yasinan* yang semestinya adalah tradisi keagamaan kelompok tradisional, tetapi telah ternegosiasi dan teradaptasi dengan kelompok modernis. Terlepas dari latar sosio historis politis dalam pembentukannya, namun tradisi ini telah mengakomodasi beberapa kelompok keagamaan di Rao.

Kalangan tradisional di daerah perbatasan juga tidak bisa disebut sebagai sinkretis dalam perspektif sinkretisme agama seperti penelitian Benda (1980), Peacock (1978), Woodward (1999) dan Beaty (2001). Mereka tidak ragu menyebutkan Islam sinkretis untuk penganut paham keagamaan tradisional. Dalam analisis Peacock (1978), oleh karena budaya dan agama sinkretis dianggap agama campuran, maka muncul gerakan pemurnian agama yang

disebut gerakan puritan guna membersihkan agama campuran tersebut. Namun fenomena lain ditemukan di lapangan bahwa kalangan tradisional mulai menyadari agama campuran akan merusak orisinalitas prinsip-prinsip agama. Ibarat gayung bersambut kesadaran kelompok tradisional ini menjadikan kelompok modernis semakin moderat dan toleran.

Dengan demikian, interaksi antara kelompok modernisme dan tradisionalisme dalam dimensi-dimensi keagamaan menghasilkan corak keagamaan yang akomodatif, akulturasi dan adaptatif baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun budaya lokal yang sudah mentradisi. Perpaduan agama dan budaya lokal dalam masyarakat perbatasan masih terintegrasi dengan baik terutama dalam kelompok modernis dan apalagi kelompok tradisional. Kalau boleh dikatakan perpaduan tersebut sebagai sinkretisme baru dalam aspek agama, karena merupakan sebuah konstruksi identitas agama sebagai bentuk ketaatan pada agama yang bersifat orisinal. Di samping itu juga sebagai upaya saling menyadari pentingnya budaya lokal dalam kehidupan keagamaan serta toleran di antara masing-masing paham keagamaan. Hal ini dapat dipahami bahwa sinkretisme tidak hanya dipahami sinkretisme agama *ansich* secara sempit sebagai percampuran antara dua tradisi atau lebih yang terjadi ketika masyarakat mengadopsi sebuah ‘agama’ baru dan berusaha tidak membuatnya tidak bertabrakan dengan gagasan dan praktik budaya lama. Namun sinkretis merupakan konsep yang mengandung harmonisasi dari paham keagamaan dan nilai-nilai budaya yang berbeda. Sinkretisme baru ini mengarah pada mencari titik temu dan menghilangkan perbedaan.

Perubahan Identitas Budaya Etnik: Sebuah Integrasi Budaya Mayoritas dan Minoritas

Selanjutnya, perubahan budaya juga ditemukan dalam interaksi sosial antar etnik di daerah perbatasan Sumatera Barat. Perubahan identitas yang mengarah pada perubahan budaya sangat simultan dan intens terjadi pada komunitas etnik yang beragam. Hal ini didukung oleh kultur masyarakat Minangkabau yang memiliki kecenderungan terbuka dan toleran terhadap perubahan dan pengaruh budaya lain. Padahal pada prinsipnya, dalam suatu masyarakat di mana tumbuh dan berkembang kebudayaan mayoritas cenderung dominan dan terkesan menguasai kelompok minoritas. Dalam penelitian Eriksen (1993) masing-masing etnik dalam proses interaksinya cenderung untuk

mempertahankan identitas etniknya. Pada masyarakat budaya yang mayoritas berkeinginan untuk menerapkan identitas etnik dalam proses sosial mereka. Sementara dalam Budiman (2009) masyarakat budaya minoritas berusaha secara diam-diam mempertahankan identitas etnik mereka dari dominasi budaya mayoritas. Bahkan, keabsahan budaya dominan tersebut seakan-akan membuka peluang menguatnya kesetiaan primordial tiap kelompok etnik.

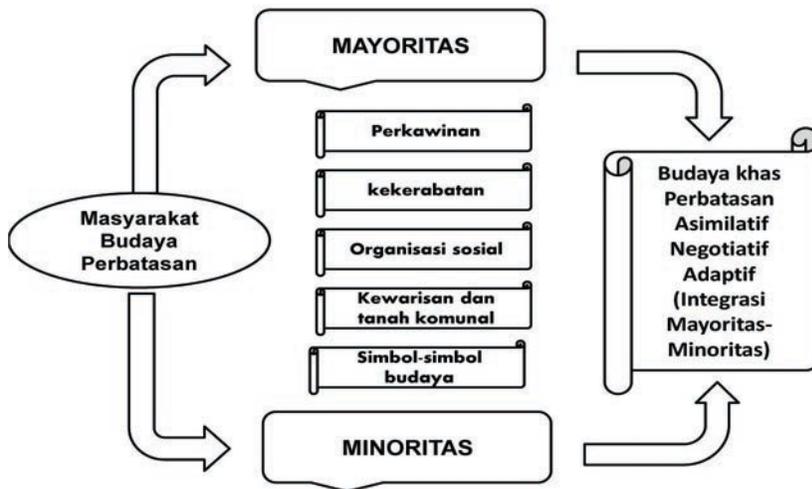
Penelitian disertasi ini menggunakan varian budaya mayoritas dan budaya minoritas untuk melihat lebih dalam unsur-unsur kebudayaan Minangkabau dalam interaksi sosial antar etnik di perbatasan. Tipologi budaya mayoritas dan budaya minoritas ditemukan dalam beberapa kajian para peneliti sosial seperti Royce sebagaimana dikutip Pelly (1983). Menurutnya dalam relasi dan hubungan antara etnik dapat dibedakan menjadi kelompok dominan dan tidak dominan. Kelompok dominan berasal dari kombinasi antara kekuatan material, ideologis dan hak historis. Mereka banyak menentukan aturan-aturan permainan dalam masyarakat majemuk tersebut. Sementara itu, Preece (2005) mendefinisikan minoritas sebagai kelompok yang tidak memiliki karakteristik peradaban menurut ukuran tertentu, serta tidak memiliki hak-hak penuh dalam masyarakat. Menurutnya, perbedaan agama dan etnik dalam suatu komunitas menyebabkan adanya diskriminasi, penganiayaan dalam tingkatan verbal maupun tindakan yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat mayoritas atau bahkan melalui kebijakan di suatu negara. Bahkan menurut Bruner (2001) ada tiga hal yang menentukan suatu kelompok etnik itu berstatus dominan yaitu faktor demografis, politis dan budaya lokal sehingga kelompok dominan mencoba berfungsi sebagai wadah pembauran.

Namun di daerah perbatasan, etnik asli dan etnik pendatang pada awalnya terkonsentrasi pada kantong-kantong berdasarkan etnik yang sama. Saat ini, kantong-kantong etnik tersebut sudah menyebar dan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu, sehingga pada satu daerah etnik Minang mayoritas, sementara itu etnik Mandailing atau Batak Toba menjadi minoritas. Adakalanya pada suatu daerah etnik pendatang yang mayoritas sedangkan etnik asli menjadi minoritas. Jadi, etnik Minang sebagai etnik asli tidak bisa dikatakan mayoritas dan etnik Mandailing dan Batak Toba menjadi minoritas. Di daerah ini sedikit demi sedikit komunitas etnik Minangkabau yang mayoritas mulai berkurang seiring proses migrasi etnik lain. Dengan terbukanya komunitas asli terhadap etnik lain sehingga satu persatu kantong mayoritas Minangkabau maupun

mayoritas etnik lain akan berubah menjadi komunitas campuran yang terbuka dan toleran.

Varian budaya mayoritas dan minoritas ini digunakan secara bersamaan untuk menjelaskan unsur-unsur kebudayaan berdasarkan pola C. Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (2005) seperti perkawinan, kekerabatan, struktur sosial, kewarisan dan harta komunal serta simbol-simbol budaya. Relasi sosial antar kelompok etnik pada masyarakat perbatasan tergambar pada bagan berikut:

Bagan 4. Perubahan Identitas Budaya Etnik Minangkabau di Rao



Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, interaksi antaretnik di daerah perbatasan mengarah pada integrasi budaya mayoritas dan minoritas. Dalam budaya perkawinan di daerah multi etnik ini terdapat sistem adat perkawinan *jujur pinang sabatang*² yang terbentuk dari asimilasi dari keheterogenitasan masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Pedoman yang dipakai dalam pelaksanaan perkawinan pada prinsipnya masih menjalankan adat dan tradisi masing-masing. Namun dalam kasus tertentu diambil jalan

² *Jujur pinang sabatang* merupakan pola menetap sesudah menikah pada masyarakat Pasaman yang bersifat patrilokal bahwa istri menetap di lingkungan kerabat suaminya. *Jujur pinang sabatang* artinya seorang laki-laki (suami) boleh membawa istri tinggal di lingkungan kerabatnya disebabkan laki-laki (suami) tidak mempunyai saudara perempuan

kompromi dan asimilasi dari keduanya. Sementara itu, dalam identitas kekerabatan terdapat beberapa perubahan terutama pada status kekerabatan anak keturunan dari orang tua yang kawin lintas etnis. Di sini terdapat tradisi *ba moma/ba popa*, yaitu tradisi memilih dan menentukan seorang anak beretnik ke mana, bisa mengikut salah satu etnik orang tuanya apakah Minang atau Mandailing. Perubahan juga terjadi pada budaya kepemilikan harta atau kewarisan yang akhirnya muncul kompromi antara tradisi Minangkabau dan tradisi Mandailing dalam pembagian harta pusaka. Komunitas adat di daerah multietnik ini lebih cenderung mewariskan hartanya pada anak laki-laki dan perempuan dengan mengadaptasi sistem kewarisan Islam. Bentuk adaptasi ini dikuatkan dengan kultur komunitas multietnis yang sudah mempunyai kekerabatan campuran sehingga harta pusaka tidak serigid dan seketat di daerah pedalaman.

Perubahan-perubahan budaya tersebut menekankan bahwa kelompok mayoritas tidak lagi dikonstruksi sebagai kelompok dominan yang menguasai serta kelompok minoritas kelompok kecil, marjinal dan tertindas, melainkan telah terintegrasi dalam perilaku budaya bersifat asimilatif, negoiatif dan adaptatif bahkan mengarah pada budaya baru khas perbatasan. Hal ini sesuai dengan temuan Habib (2004) ketika meneliti interaksi etnik Jawa dengan etnik Cina di pedesaan Jawa menyimpulkan bahwa proses interaksi tersebut telah memunculkan konstruksi dan penempatan sosial dalam hubungan antaretnik. Kelompok etnik Jawa tidak lagi dikonstruksi sebagai kelas bawahan, dan kelompok etnik Cina sebagai kelas atasan, melainkan sama-sama sebagai mitra kerja (*partner*). Hubungan sosial antaretnik yang sebelumnya cenderung bersifat penguasaan, bergeser menjadi kerjasama (*cooperation*), dengan akibat sosial kesadaran dan kesetaraan (*awareness and equality*).

Fenomena tersebut dimungkinkan karena adanya acuan (*reference*) yang sama terutama identitas dan nilai-nilai yang sama (*shared values*) yang menjadi pedoman bagi setiap individu untuk bertingkah laku dalam berinteraksi sosial. Olsen sebagaimana dikutip Habib (2004) menganalisis bahwa penanaman nilai-nilai pluralisme budaya merupakan pendorong pelestarian keragaman budaya etnik serta memperlakukan semua kategori penduduk secara setara. Kelompok minoritas memang mungkin saja membaaur sejauh kehendak mereka sendiri, tetapi keragaman budaya etnik dihargai dan dihormati. Selain itu, tidak ada satu pun bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang ditoleransi. Sekalipun tatanan dan kebijakan demikian memang dinilai ideal

dan secara praktis sangat sulit untuk diwujudkan, tetapi tetap mungkin untuk dicapai. Sehingga, sekalipun ada peraturan perundang-undangan sebagai struktur normatif dalam kebijakan kesetaraan legal tetapi hanya bekerja dalam ruang publik, sedangkan dalam ruang privat masyarakat tetap memperlakukan secara diskriminatif kelompok minoritas. Secara formal memang ada kesetaraan, namun secara informal tetap berlangsung perlakuan diskriminatif.

Dengan tidak adanya budaya dominan, setidaknya akan mempermudah bagi terwujudnya keserasian hidup di antara berbagai kelompok, oleh karena setiap individu dalam perilakunya cenderung mengacu pada norma-norma, adat istiadat dan nilai-nilai yang disepakati dan dikonstruksi bersama, menggunakan simbol-simbol yang sama. Setiap orang akan mengacu pada nilai-nilai yang sama, maka unsur-unsur prasangka, *stereotype* antar individu dan kelompok sukar untuk muncul pada diri setiap individu. Pada gilirannya jarak sosial di antara merekapun tidak akan terbuka lebar.

KONSTRUKSI IDENTITAS AGAMA DAN BUDAYA DI RAO

Interaksi antaretnik di Rao tidak hanya mengubah identitas keberagamaan dan kebudayaan, tapi juga memunculkan sebuah bentuk identitas baru khas perbatasan. Para ahli ilmu sosial berperspektif konstruktif-interpretatif percaya bahwa identitas adalah hasil sebuah konstruksi sosial dan hasil sebuah proses dan praktik sosial. Perspektif konstruktif ini membantah perspektif primordial yang memahami identitas secara sempit dan egosentrisme. Dalam proses interaksi, konstruksi identitas dimaknai sebagai saling terbuka, berdialog, toleran dan menciptakan identitas bersama yang pada gilirannya akan mencegah atau paling tidak meminimalisir terjadinya konflik agama dan etnik.

Menurut Castell (2004), perspektif konstruktif, yang kontras dengan primordialisme berprinsip bahwa konstruksi identitas merupakan upaya respon dari tekanan situasi kelompok dominan, respon terhadap perlakuan pilih kasih, dan juga upaya defensif dari suatu kelompok etnik dominan. Berdasarkan pandangan ini, maka proses konstruksi sosial selalu dikaitkan dengan keterlibatan anggota komunitas kelompok dan elite yang merepresentasikannya. Persepsi "kami" menjadi berbeda dan pembeda dengan kelompok lain tetapi menjadi pengikat dengan kelompoknya sendiri.

Dalam pandangan konstruktivis, etnisitas merupakan upaya dari kelompok elite untuk merespon, memiliki sikap pragmatis, dan merasionalkan lingkungan. Etnisitas dipandang sebagai sesuatu yang tidak alamiah. Etnisitas dijadikan sebagai sumber politik dan sebagai sarana untuk kohesi seseorang agar dipromosikan untuk memfasilitasi artikulasi politik dari kepentingan individu dan kelompok. Dengan demikian, etnisitas adalah sesuatu yang *manipulated* dan *construction*, karena etnisitas bukan sesuatu yang diakibatkan oleh pembawaan turun temurun dan fisik saja, melainkan karena adanya konstruksi yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain secara intersubjektif. Dengan demikian, pemahaman elite terhadap etnik adalah sesuatu yang sengaja diciptakan atau dibangkitkan.

Penelitian ini berprinsip bahwa batas-batas budaya (*cultural boundary*) dan batas-batas fisik (*physical boundary*) sebuah etnik telah berubah dalam proses interaksi sosial mereka. Identitas yang pada awalnya bersifat primordial telah dikonstruksi dalam dinamika sosial mereka. Terutama untuk kasus identitas Minangkabau, menurut Franz dan Keebet (2007), sebelum desentralisasi, identitas Minangkabau tidak mengalami masalah atau dapat disepakati bersama dan sudah tetap atau *fix*. Artinya identitas Minangkabau telah mewedahi pelbagai unsur adat, agama dan sosial politik masyarakat Minangkabau. Namun, sesudah reformasi ini identitas tersebut mulai berubah dan dinegosiasikan. Masalah terbesar adalah bukan soal pendefinisian kembali batas-batas etnik dan religius dalam hubungannya dengan kelompok etnik atau kelompok agama lain. Sebaliknya, masalah yang mengemuka adalah ketidaksepakatan di dalam masyarakat Minangkabau tentang identitas kolektif mereka. Identitas Minangkabau selalu beragam, bersifat tidak pasti dan selalu dipersoalkan.

Selanjutnya, asumsi tentang identitas yang dikonstruksi ini mengacu pada pendapat Castell (2004) yang menguraikan konstruksi identitas sebagai formasi identitas, melalui tiga sudut yang berbeda, yaitu: *legitimizing identity*, *resistance identity*, dan *project identity*. *Legitimizing identity* menawarkan pembahasan bahwa identitas yang dipaksakan oleh suatu lembaga dominan. Dengan kata lain, bahwa kajian identitas dari perspektif kelompok atau lembaga dominan yang bertujuan memperoleh rasionalisasi dan justifikasi atas dominasi dan otoritasnya terhadap yang lain. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi unsur kebudayaan Minangkabau seperti sejarah etnik, agama, perkawinan dan kekerabatan, kewarisan dan kepemilikan harta komunal

serta bahasa dan simbol budaya. Ada kesan bahwa unsur-unsur budaya ini cenderung diterapkan pada semua wilayah budaya Minangkabau. Padahal, banyak varian dalam masyarakat seperti masyarakat perkotaan dan masyarakat perbatasan yang dihuni tidak hanya etnik Minangkabau, tetapi oleh beragam etnik lain yang hidup dan berdomisili di daerah tersebut.

Resistance identity, adalah identitas tandingan yang muncul menentang penyeragaman identitas oleh lembaga dominan. Secara umum, fenomena ini dapat dengan mudah ditemukan di kalangan kelompok minoritas serta mereka yang termarginalkan. Di daerah perbatasan terdapat beberapa perubahan identitas yang berbeda dari identitas Minangkabau sebelumnya sebagai bentuk dinamika sosial dalam masyarakat multietnik. Dalam aspek agama, terdapat beberapa perubahan identitas perilaku keagamaan kalangan penganut tradisional dan modernis sebagai bentuk dinamika sosial keagamaan. Bahkan dalam dimensi budaya, interaksi sosial antaretnik telah mengubah unsur-unsur identitas budaya etnik Minangkabau seperti perkawinan, kekerabatan, organisasi sosial, kewarisan, kepemilikan harta komunal, bahasa dan simbol budaya.

Project identity, sebagai identitas baru, dibangun dengan antusias oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui proses interaksi antara etnik selama puluhan tahun. Perubahan identitas agama dan budaya etnik Minangkabau kemudian mengarah pada terciptanya konstruksi identitas agama dan budaya tersendiri seperti tradisi keagamaan *wirid yasinan*, peringatan hari besar keagamaan bersama dan tradisi budaya perkawinan *jujur pinang sabatang* serta tradisi *ba moma/ ba popa* sebuah adat pindah suku atau marga. Bahkan, dengan munculnya identitas baru tersebut memancing sebagian kalangan untuk mewacanakan sebuah konstruksi sejarah “baru” masyarakat Rao. Di lapangan ditemukan beberapa wacana bahwa mereka punya identitas dan sejarah tersendiri yang berbeda dengan identitas Minangkabau yang selama ini di”lekat”kan pada mereka.

Konstruksi Identitas Agama dan Budaya untuk Pluralitas Indonesia.

Dari temuan di lapangan tentang konstruksi identitas etnik Minangkabau semakin terbukti bahwa identitas bukan hanya sekedar bersifat pribadi, permanen dan tidak bisa berubah. Ternyata bisa berubah, didialogkan, dinegosiasikan atau direkonstruksi. Bahkan dalam proses modernisasi

yang berjalan sangat cepat ini batas-batas identitas tersebut semakin kabur dan bahkan hilang. Tekanan politik rezim Orde Baru, yang disertai oleh penggunaan kekuatan bersenjata, memunculkan kesan seolah-olah identitas itu adalah aspek kebudayaan yang primordial dan langgeng. Diskursus kebudayaan rezim Orde Baru menciptakan efek esensialis tentang konsep kebudayaan dan terhadap pengertian identitas yang terdapat di dalamnya (Ramstedt dan Thufail 2011). Dengan runtuhnya Orde Baru sebagai penjaga esensialisme identitas, terbuka lebar pelbagai kemungkinan untuk kembali mempersoalkan identitas nasional, etnik, agama dan daerah. Identitas menjadi hal yang terbuka untuk ditafsirkan kembali, ditangkap dan dimanfaatkan dalam proses sosial dan negosiasi politik, dan juga dikembalikan pada ruang kultur tradisi.

Persoalan yang muncul kemudian, setelah runtuhnya rezim Orde Baru ini adalah bagaimana mengelola perbedaan etnik dan agama dalam pluralitas Indonesia di tengah kebangkitan identitas agama dan etniknya. Menurut Ju Lan (2006), membicarakan persoalan agama dan etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk hari ini, artinya membahas kekompleks-an makna etnisitas, khususnya pada ruang-ruang pertemuan antara etnisitas yang direkonstruksikan oleh negara dengan etnisitas yang terkonstruksi akibat dinamika masyarakat sendiri dari generasi ke generasi. Selanjutnya menurutnya etnisitas dalam konteks kekuasaan merupakan bentuk rekonstruksi yang dibuat atas dasar perbedaan antara kita dan yang lain. Artinya kita ada karena ada yang lain, begitu pula yang lain ada karena ada kita. Di dalam negara bangsa Indonesia yang majemuk, rekonstruksi etnisitas bertolak dari konsep mayoritas dan minoritas, superioritas dan inferioritas, dominasi dan subordinasi.

Sampai saat ini, kajian tentang konflik di Indonesia banyak berawal dari pandangan yang menganggap bahwa konflik itu merebak karena diakibatkan atau dipengaruhi oleh identitas kelompok yang berbeda (Ju Lan, 2007). Akan tetapi, menurut Abdullah (2007), konflik-konflik yang terjadi di Indonesia selama ini bukan semata-mata persoalan perbedaan budaya etnik, tetapi sudah lebih mengakar sebagai kesalahan berbagai pihak dalam mengelola perbedaan dan konflik itu sendiri. Edwar Azar seperti dikutip Abdullah (2007) menegaskan faktor pengingkaran kepentingan identitas kelompok sebagai faktor sentral dalam pertikaian etnik yang kemudian membentuk kesadaran kelompok yang berlebihan dan eksklusif sosial.

Menurut Budiman (2009), penyebab konflik etnik dan agama bukan keterbukaan politik saat ini tapi justru represi politik dan kultural di masa lalu. Konflik-konflik berbasis etnik dan agama di Ambon, Poso, Sampit dan di lain-lain tempat, terjadi bukan karena identitas-identitas partikular itu mendapat pengakuan atau rekognisi yang lebih baik, melainkan karena sebelumnya mereka telah diingkari. Jika demikian maka alih-alih menguatkan kesatuan atau integrasi nasional, pengabaian terhadap diversitas kultural justru terbukti telah menimbulkan *disunity* (ketidakbersatuan).

Memahami kembali makna “*Bhinneka Tunggal Ika*” merupakan upaya penting dalam mengelola perbedaan etnik dan agama di Indonesia saat ini. Parsudi Suparlan sebagaimana dikutip Budiman (2009) berpendapat cara terbaik memahami kebhinekaan adalah dengan mengubah masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat multikultural (*multicultural society*) dengan cara mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam bangunan baru tersebut, *Bhinneka Tunggal Ika* tidak bisa lagi dipahami sebagai keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

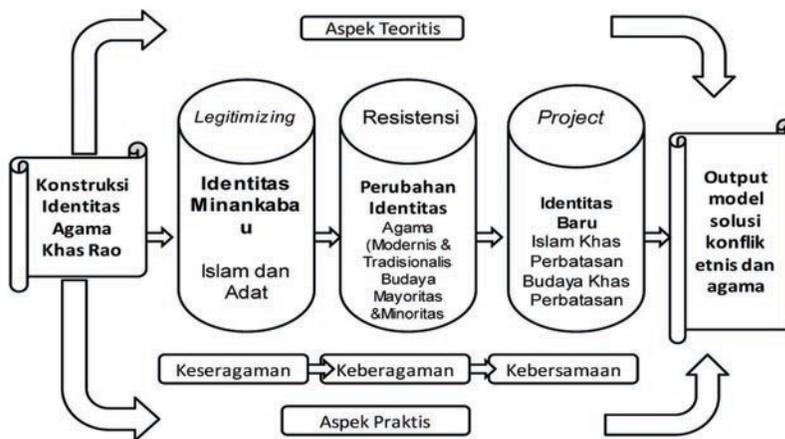
Persoalan mendasar dalam isu-isu multikulturalisme dalam konteks Indonesia bukan terletak pada kenyataan tentang terdapatnya perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, melainkan lebih pada berlangsungnya praktik-praktik pembedaan (*distinction*) oleh yang satu terhadap yang lain. Konsep tentang perbedaan merupakan deskripsi bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik dan identitas yang berbeda satu dari yang lainnya. Sedangkan, konsep pembedaan lebih merujuk pada serangkaian proses melalui keunikan masing-masing karakter yang dipakai sebagai acuan untuk menetapkan bentuk-bentuk relasi sosial di antara mereka. Perbedaan menjadi sumber persoalan ketika ia menjadi dasar pembedaan perlakuan terhadap masing-masing kelompok. Pembedaan adalah bentuk rekognisi terhadap perbedaan tapi dalam cara yang negatif, yakni dalam bentuk penciptaan jarak hierarkis di atas apa diskriminasi didasarkan. Ironisnya, pembedaan juga terjadi justru karena proses pencarian kesamaan dan kesatuan melalui proses asimilasi. Yang berbeda diusahakan untuk bisa masuk ke dalam “yang sama” dan yang minoritas. Asumsinya yang dimunculkan bahwa hanya melalui asimilasi dengan kelompok yang lebih besarlah kelompok-kelompok

kecil ini bisa menjadi warga yang sederajat dan berhak sepenuhnya atas akses-akses pada pelayanan publik yang disediakan oleh negara, sehingga yang memilih tetap berbeda akan menjadi lain dan minoritas.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konstruksi identitas merupakan sebuah solusi dalam memahami dan mengelola perbedaan etnik dan agama daripada asimilasi dan tekanan militer atau bahkan model integrasi politik seperti ditawarkan peneliti sebelumnya. Konstruksi identitas merupakan proses perubahan sosial dalam interaksi sosial masyarakat multietnik yang berjalan secara alamiah. Belajar dari kasus masyarakat multietnik di Rao, dalam proses interaksi dan keterbukaan masyarakat ternyata identitas agama dan etnik telah mengalami proses perubahan dalam bentuk akomodasi, akulturasi, adaptasi dan bentuk integrasi lainnya. Bukan hanya itu proses integrasi tersebut telah membentuk identitas baru sebagai identitas bersama mereka.

Selanjutnya penelitian ini mengemukakan bagan mekanisme dan implementasi konstruksi identitas perbatasan yang mengarah pada terciptanya identitas baru dalam proses interaksi antaretnik di perbatasan sebagai sebuah solusi pemecahan dan peredaman konflik etnik dan agama yang selama ini terjadi .

Bagan 5. Mekanisme dan Implementasi Konstruksi Identitas Agama dan Budaya Etnik Minangkabau di Rao



Berdasarkan mekanisme dan implementasi konstruksi identitas etnik Minangkabau di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat multietnik di Rao bisa hidup secara rukun dan damai dengan keragaman etnik dan paham keagamaan. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa komunitas budaya Rao sebagai laboratorium alami dengan prinsip kebersamaan di tengah keragaman etnik dan agama. Persoalan perubahan identitas agama dan budaya memperlihatkan adanya simbol-simbol dan batas-batas identitas yang selalu berubah dalam interaksi antar etnik di daerah perbatasan.

Dengan demikian, penelitian ini bisa diterapkan sebagai model untuk memahami, penanganan dan pemecahan konflik sosial yang terjadi di wilayah Nusantara. Selama ini penanganan konflik etnik yang muncul dalam komunitas yang berbeda etnik dipaksakan untuk menaati aturan bersama tanpa mengkaji sebab akibat dari perbedaan mereka. Sekalipun ada upaya memahami perbedaan hanya menjurus pada prinsip memahami perbedaan. Sikap ini masih memancing sentimen kelompok dan primordial etnis karena mereka cenderung hidup sendiri-sendiri. Sikap tersebut belum mengarah pada upaya hidup bersama dengan rukun dan damai. Dengan temuan konstruksi identitas, sebuah komunitas berbeda etnik, agama dan ras menuju pada prinsip kebersamaan dalam aktivitas sosial mereka. Jadi, konstruksi identitas ini berangkat dari perspektif keseragaman, kemudian melangkah ke keberagaman selanjutnya harus menuju pada kebersamaan.

KESIMPULAN

Penelitian tentang konstruksi identitas agama dan budaya etnik Minangkabau ini menguji teori identitas terutama di daerah multietnik di wilayah perbatasan. Berdasarkan temuan di lapangan, identitas merupakan suatu konsep yang berubah dan bisa dikonstruksi secara alamiah dalam proses interaksi sosial masyarakat multietnik. Sementara itu, interaksi sosial etnik Minangkabau dengan kelompok etnik di daerah perbatasan berlangsung dinamis. Realisasinya dapat dilihat dalam bentuk interaksi sosial yang unik antar individu-individu dan antarkelompok etnik dalam suatu masyarakat. Interaksi yang terjadi pada prinsipnya merupakan proses pengorganisasian berbagai identitas agama dan etnis dalam kehidupan sehari-hari.

Interaksi sosial antaretnik di daerah perbatasan telah mengubah identitas agama dan identitas budaya etnik Minangkabau. Interelasi agama dan budaya lokal dalam masyarakat perbatasan masih berintegrasi dengan baik, kedua unsur ini saling memengaruhi perubahan-perubahan identitas agama maupun budaya. Konstruksi identitas keagamaan seperti perayaan hari besar keagamaan bersama dan wirid *yasinan* merupakan tradisi keagamaan khas Rao yang terlahir dari sikap saling memahami di antara paham keagamaan. Identitas itu merupakan sebuah sinkretisme baru yang mengarah pada pencarian titik temu dan menghilangkan perbedaan di antara paham keagamaan serta respon terhadap tradisi budaya lokal. Di samping itu, perubahan identitas budaya etnik Minangkabau di perbatasan terjadi dalam interaksi sosial antara komunitas mayoritas dan minoritas. Perubahan budaya tersebut melahirkan konstruksi identitas budaya seperti tradisi *jujur pinang sabatang* dan tradisi *ba moma/ ba popa*, tradisi-tradisi budaya yang mengintegrasikan antara budaya mayoritas dan budaya minoritas, atau budaya tuan rumah dengan budaya pendatang.

Dengan demikian, interaksi antaretnik di Rao tidak hanya mengubah identitas keberagaman dan kebudayaan, tapi melahirkan sebuah konstruksi identitas dalam bentuk identitas baru khas perbatasan. Konstruksi identitas agama dan budaya tersebut merupakan identitas yang dibangun berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu dan masa kini. Kebangkitan identitas ini sebagai akumulasi dari perubahan-perubahan identitas agama dan budaya yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan rekonstruksi sejarah baru masyarakat perbatasan merupakan kesadaran akan perubahan-perubahan identitas serta antiklimaks dari kesadaran sejarah yang selama ini dianggap dikaburkan dan dimanipulasi.

PUSTAKA ACUAN

- Abdullah, Irwan. 2007. *Konstruksi dan Rekonstruksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnan, Gusti. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
- Batuah, Ahmad Datuk. 1956. *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Beatty Andrew. 2001. *Variasi Agama di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

- Beck, Herman. 1995. "Islamic Purity at Odds with Javanese Identity: The Muhammadiyah and the Celebration of the Garebeg Maulud Ritual in Yogyakarta" dalam Jan Plavoet and Karel van Der Toorn (ed). *Pluralisme and Identity, Studies in Ritual Behavior*. Leiden and New York Koln: EJ. Brill.
- Beckmann, Franz dan Keebet von Benda. 2007. "Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau" dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Benda, Harry. 1980. *Bulan Sabit dalam Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Benda, Von Beckmann Franz and Keebet. 2007. "Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas Politik Minangkabau", dalam Henk Schulte Nordholt (et al) *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Biezeveld, Renske. 2010. "Ragam Peran Adat di Sumatera Barat" dalam Jamie S. Davidson (et.al.), *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- Bradley, H. 1997. *Fractured Identity: Changing Patterns of Inequality*. Cambridge: Polity.
- Brown, Michael. 1997. *Nationalism and Ethnic Conflict*. Cambridge: Library of Congress.
- Budiman, Hikmat (et.al). 2009. *Hak Minoritas: Ethnos, Demos dan Batas-batas Multikulturalisme*. Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Burner. 2001. "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatera" dalam *American Anthropology* Vol. 63 (3).
- Castells, M. 2004. *The Power Of Identity*. USA: Blackwell.
- Castles. 1974. "Statelessness and Stateforming Tendencies among the Batak before Colonial Rule" dalam *Pre Colonial State Systems in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: The Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society.
- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity and Nationalism, Anthropological Perspective*. London: Pluto Press.
- Geertz, Clifford. 1966. *The Religion of Java*. London: The Free Press.
- Habib, Achmad. 2004. *Konflik Antaretnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta: LKIS.
- Hajar, Ibnu. 1998. "Dinamika Inteteraksi Antaretnik dalam Mewujudkan Keserasian Sosial di Kotamadya Medan", *Disertasi Doktor Ilmu Sosial*. Bandung: Perpustakaan Pusat Universitas Padjajaran.
- Hall, Stuart (et.al). 1996. *Question of Social Identity*. London: Sage Publications.

- Hasanuddin. 2009. "Wacana identitas Etnik Masyarakat Minangkabau di Bali", Disertasi Program Doktor Ilmu Budaya. Denpasar: Perpustakaan Pusat Universitas Udayana Bali.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kahn, Joel S. 1995. *Culture, Multiculture, Postculture*. London: Sage Publications.
- Kambo, Gustiana. 2008. "Memahami Politik Identitas Pemikiran tentang Pencarian Identitas Etnik: Sebuah Kajian dalam Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat", *Makalah* disampaikan pada Seminar Internasional ke-9 "Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara", yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik, Salatiga – Jawa Tengah, pada tanggal 15 – 17 Juli 2008
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi: Pokok-pokok Etnografi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Lan, Thung Ju, (et.al). 2006. *Klaim Kontestasi dalam Konflik Identitas Lokalitas versus Nasionalitas*. Jakarta: LIPI Press.
- MacKay, Bruce. 2000. "Ethnicity" dalam Willi Braun and Russell T. Mc Cutcheon, *Guide to the Study of Religion*. Cassell: London and New York.
- Maunati, Yekti. 2006. *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. 2007. "Pendahuluan" dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (et.al), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nursyam. 2009. *Mazhab-mazhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS.
- Peacock, James L. 1978. *Muslim Puritan: Reformist Psychology in South East Asia*. Berkeley: University of California Press.
- Pelly, Usman. 1983. *Urbanisasi dan Adaptasi di Indonesia: Studi terhadap Etnis Minangkabau dan Batak Mandailing di Kota Medan*. Jakarta: LP3ES.
- Preece, Jenifer Jackson. 2005. *Minority Right*. Cambridge: Polity Press.
- Ramstedt, Martin (et.al). 2011. *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca Orde Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rodney, Stark and Charles Y. Glock. 1968. *American Piety, The Nature of Religious Commitment*. California: University of California Press.

- Rozi, Syafwan. 2008. “Relasi Agama dan Negara dalam Konteks Politik Lokal (Dinamika Formalisasi Islam dalam Perda Nagari dan Perda-perda Syariah di Sumatera Barat)” Ringkasan penelitian ini telah disampaikan pada Seminar Internasional ke-9 “Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik dan Ford Foundation di Salatiga – Jawa Tengah, pada tanggal 15 – 17 Juli 2008
- Sango, Datoek Batoeah. 1966. *Tambo Alam Minangkabau: Jaitu Asal Usul Minangkabau Segala Peraturan dan Undang-undang Hukum Disegala Negeri Jang Masuk Daerah Minangkabau*, edisi ke-5. Pajakumbuh: Limbago.
- Smith, Rita R. 1993. *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian Society*. The United States of America: The University of Michigan Press.
- Soekanto, Soejono. 1969. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.
- Sparringa, Daniel. 2005. “Multikulturalisme sebagai Respon Alternatif terhadap Politik Identitas dan Resolusi Konflik yang Bersifat Transformatif: Sebuah Perspektif Sosiologi Politik”. *Makalah* yang disampaikan pada kursus dan pelatihan singkat tentang HAM dan Demokrasi, oleh CESASS-UGM dengan NCHR Oslo University, Norwegia, Jogyakarta, 28 Nov-2 Des 2005
- Suparlan, Parsudi. 1989. *Interaksi Antaretnik di Beberapa Provinsi di Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Sutiyono. 2011. *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretisme*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Syukur, Abdul. 2010. “Konstruksi identitas Agama Budha Tahun 1950-1960 an”, *makalah* pada *International Conference on Postcolonial Indonesian Identity* yang diselenggarakan Jurusan Sejarah UGM Yogyakarta bekerjasama dengan Institut Sejarah Indonesia, Universitas Leiden dan Australian National University, 14-15 Januari 2010
- Tim Penyusun. 2009. *Pasaman Dalam Angka*. Lubuk Sikaping: Genta.
- Undri. 2008. *Hulului Anak Hulului Tona: Menelusuri Tradisi Migrasi Orang Mandailing ke Pasaman*”, dalam *jurnal Suluah Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang (BPSNT) Vol 8 No. 9, Desember 2008
- Woodward, Mark R. 1999. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKIS.